

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik: Studi Pembentukan Duta, Penyuluh, Dan Kader Tahun 2021–2025

Hermaniar¹, Widiastuti²

^{1,2} Badan Pengawas Obat dan Makanan

Email: hermaniar@pom.go.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi memperluas akses masyarakat terhadap derasnya arus informasi dan beragamnya pilihan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik (OBASKK). Pada saat yang sama hal ini meningkatkan potensi terhadap misinformasi, klaim berlebihan, promosi menyesatkan, yang berdampak pada pemilihan produk OBASKK yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pemberdayaan yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah dalam perlindungan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, capaian, faktor pendukung, tantangan, serta arah pengembangan kegiatan pembentukan duta, penyuluh, dan kader Direktorat PMPU OTSKK selama 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen laporan tahunan sebagai sumber utama, didukung dokumen kebijakan dan literatur yang relevan, dengan tahapan pengumpulan data, reduksi, perbandingan antar tahun, dan interpretasi berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya 1.201 agen perubahan yang terdiri atas 25 Duta Jamu Aman, 285 Duta Kosmetik Aman, 82 penyuluh, dan 809 kader, dengan jangkauan, edukasi dan informasi (KIE) sebanyak 2.081.929 masyarakat atau rata-rata sekitar 1.733 orang per agen perubahan. Kegiatan berkembang dari pendekatan berbasis Duta melalui Program BPOM Goes to School/Campus menuju penguatan penyuluh dan kader melalui Program BPOM Goes to Community. Keunggulan program terletak pada efek pengganda, struktur pendampingan berjenjang, materi terstandar, dukungan UPT Badan POM, pemanfaatan aplikasi pelaporan SiKerja Duper, dan kolaborasi lintas sektor. Data penelitian didominasi indikator keluaran dan belum mengukur perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, serta intensitas pelaporan masyarakat. Karena itu, program perlu diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan, pelaporan real time, serta penguatan monitoring dan evaluasi yang berbasis outcome. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan agen perubahan merupakan strategi penting untuk memperluas edukasi, memperdalam keterlibatan komunitas, dan memperkuat pengawasan partisipatif di bidang OBASKK.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Agen Perubahan, Literasi Kesehatan, Duta, Penyuluh, Kader, Pengawasan Partisipatif, Obat Bahan Alam, Supleme Kesehatan, Kosmetik

Abstract

The rapid development of information technology and digitalization has expanded public access to the growing flow of information and the wide range of natural medicines, health supplements, and cosmetic products (OBASKK). At the same time, these developments have increased the risk of misinformation, exaggerated claims, and misleading promotions, which may influence consumers to select OBASKK products that fail to meet safety, quality, and efficacy requirements and may consequently endanger public health. This situation highlights the importance of empowerment strategies that position communities not merely as recipients of information but also as active government partners in health protection. This study aimed to analyze the implementation, achievements, supporting factors, challenges, and future development of the ambassador, educator, and community cadre formation activities conducted by the Directorate of Community Empowerment and Business Actors for Traditional Medicines, Health Supplements, and Cosmetics during 2021–2025. A qualitative descriptive approach was employed through document analysis, using annual reports as the primary data source and supported by relevant policy documents and literature. The analysis involved data collection, reduction, interannual comparison, and interpretation based on the concept of community empowerment. The results showed that 1,201 agents of change were established, comprising 25 Safe Herbal Medicine Ambassadors, 285 Safe Cosmetics Ambassadors, 82 educators, and 809 community cadres. These agents reached 2,081,929 people through communication, information, and education activities, equivalent to an average of approximately 1,733 people per agent of change. The activities evolved from an ambassador-based approach under the BPOM Goes to School/Campus Program toward strengthening educators and community cadres through the BPOM Goes to Community Program. The program's main strengths included its multiplier effect, tiered mentoring structure,

standardized educational materials, support from the Indonesian Food and Drug Authority's technical implementation units, utilization of the SiKerja Duper reporting application, and cross-sector collaboration. However, the available data were predominantly limited to output indicators and had not yet measured changes in knowledge, attitudes, behavior, or the intensity of public reporting. Therefore, the program should be strengthened through continuous capacity building, real-time reporting, and outcome-based monitoring and evaluation. This study concludes that establishing agents of change is an important strategy for expanding public education, deepening community engagement, and strengthening participatory oversight in the field of natural medicines, health supplements, and cosmetics.

Keywords: Community Empowerment, Change Agents, Health Literacy, Participatory Surveillance, Traditional Medicines, Traditional Medicine, Health Supplement, And Cosmetic Products

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan serta mendukung upaya perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar, mengambil keputusan, serta mendorong perubahan perilaku untuk meminimalkan penggunaan produk obat dan makanan yang berisiko karena tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat.

Secara normatif, pendekatan ini memiliki landasan yang kuat, baik pada tataran nasional maupun global. Pada tataran nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan kesehatan [1]. Pada tataran global, World Health Organization (WHO) melalui *Ottawa Charter for Health Promotion* menegaskan bahwa penguatan aksi masyarakat (*strengthening community action*) merupakan salah satu strategi utama promosi kesehatan [2]. Komitmen tersebut ditegaskan kembali melalui *Shanghai Declaration on Health Promotion* yang menekankan tata kelola yang baik, peningkatan literasi kesehatan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [3]. Lebih lanjut, WHO menempatkan pemberdayaan masyarakat, partisipasi bermakna, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas sebagai elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan sistem kesehatan yang tangguh [4]. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak lagi dipahami sebagai penyampaian informasi semata, melainkan sebagai proses pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan.

Kebutuhan akan pemberdayaan semakin relevan di tengah transformasi digital yang mengubah cara masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mengakses produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik (OBASKK). Survei *Profil Internet Indonesia 2025* yang diterbitkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet mencapai 229,43 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 80,66% dari total penduduk [5]. Tingginya akses digital ini berjalan seiring dengan pergeseran perilaku pencarian informasi kesehatan ke ruang daring. Sebuah studi pada kelompok mahasiswa, misalnya, menemukan bahwa mayoritas perilaku pencarian dan penarikan kesimpulan atas informasi kesehatan bersumber dari internet dan media sosial, yang tidak jarang berujung pada perilaku diagnosis diri tanpa verifikasi memadai [6]. Fenomena ini menegaskan bahwa kemudahan akses tidak serta merta diiringi kemampuan menilai keakuratan informasi yang diterima.

Persoalan tersebut diperberat oleh maraknya misinformasi, disinformasi, klaim produk yang berlebihan, promosi yang menyesatkan, serta peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan melalui platform digital. Dalam konteks demikian, kemampuan masyarakat untuk mencari, memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi kesehatan secara kritis menjadi inti

dari konsep literasi kesehatan [7], [8] menjadi determinan penting bagi dalam kemampuan masyarakat dalam keputusan untuk memilih dan menggunakan OBASKK yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan digital masyarakat masih perlu diperkuat, sehingga upaya edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan tetap diperlukan [7].

Penguatan literasi ini tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada pengawasan pemerintah. Luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk, dan kompleksitas distribusi produk menjadikan pelibatan masyarakat menjadi komponen yang sangat penting dalam sistem pengawasan yang berorientasi pada masyarakat [9]. Arah kebijakan ini tercermin dalam Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025–2029 yang menetapkan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu tercatat meningkat selama 2020–2024 dan mencapai 88,09 pada 2024, dengan target 89,40 pada 2029 [10]. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi dan keberdayaan masyarakat telah menjadi bagian integral dari strategi nasional pengawasan obat dan makanan.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Badan POM melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Dit. PMPU OTSKK) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembentukan duta, penyuluh, dan kader di bidang OBASKK. Istilah *obat bahan alam* pada tulisan ini merujuk pada nomenklatur terkini bagi *obat tradisional*. Program ini dirancang untuk membangun jejaring edukasi berbasis masyarakat sehingga penyebarluasan informasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang telah dibekali untuk menjadi penyampai informasi di lingkungannya masing-masing.

Sejumlah penelitian telah menegaskan efektivitas pendekatan pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan, misalnya, terbukti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat serta pada gilirannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat [11]. Pendekatan serupa juga efektif dalam konteks pengendalian penyakit menular; pemberdayaan komunitas terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tuberkulosis [12]. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pembentukan duta, penyuluh, dan kader sebagai strategi pemberdayaan dalam mendukung pengawasan OBASKK masih terbatas, terutama yang menelaah implementasi program secara berkelanjutan beserta kontribusinya terhadap penguatan jejaring edukasi berbasis masyarakat. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, capaian, faktor pendukung, dan tantangan program pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukan duta, penyuluh, dan kader yang dilaksanakan Direktorat PMPU OTSKK pada tahun 2021 hingga tahun 2025, serta kontribusinya terhadap perluasan jangkauan edukasi, penguatan literasi masyarakat dan pengawasan partisipatif di bidang OBASKK.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis dokumen sebagai metode utama. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2021–2025 (lima laporan tahunan) [13]–[17] sebagai sumber data utama, yang dipublikasikan melalui kanal informasi publik Direktorat PMPU OTSKK, dilengkapi laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen kebijakan, serta literatur yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat di bidang OBASKK sebagai sumber pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai model dan implementasi program, jumlah duta, penyuluh, dan kader yang dibentuk pada setiap tahun, jenis kegiatan penguatan kapasitas, bentuk kolaborasi lintas sektor, serta jangkauan kegiatan KIE. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi

data dengan memilah informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan model; serta penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan pola capaian dan keterkaitannya dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Data kuantitatif capaian diolah lebih lanjut untuk memperoleh jumlah kumulatif, laju pertumbuhan tahunan, dan komposisi agen perubahan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-laporan tahunan dan dokumen pendukung.

Lingkup penelitian ini terbatas pada analisis keluaran program (jumlah agen perubahan yang dibentuk dan jangkauan edukasi) sebagaimana terekam dalam dokumen resmi, dan tidak mengukur secara langsung perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku masyarakat penerima edukasi. Keterbatasan ini dielaborasi pada bagian akhir pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Implementasi Program Pembentukan Duta, Penyuluh, dan Kader

Pada tahap awal implementasi, strategi pemberdayaan masyarakat difokuskan pada pembentukan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman sebagai representasi generasi muda yang dinilai mampu menyampaikan pesan edukasi secara kreatif, komunikatif, dan dekat dengan lingkungan sebaya. Pendekatan ini menempatkan pelajar dan mahasiswa bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai penyampai pesan mengenai penggunaan produk OBASKK yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan program, strategi tersebut diperluas melalui pembentukan Penyuluh dan Kader di bidang OBASKK yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Perluasan ini menunjukkan perubahan pendekatan dari edukasi berbasis figur muda menuju jejaring pemberdayaan yang lebih beragam, terstruktur, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara operasional, pembentukan agen perubahan dilaksanakan melalui dua payung program yang saling melengkapi. Pembentukan Duta Kosmetik Aman dan Duta Jamu Aman pada 2021 dan 2022 dilakukan melalui program BPOM Goes to School/Campus, dengan sasaran utama pelajar dan mahasiswa sebagai figur muda yang dapat menyebarkan pesan edukasi di sekolah, kampus, dan lingkungan sosialnya. Sementara itu, pembentukan Penyuluh dan Kader dikembangkan melalui program BPOM Goes to Community yang menjangkau komunitas masyarakat secara lebih luas.

Penyuluh dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan tenaga pengajar, serta dibentuk bersamaan dengan kader. Selain melaksanakan KIE, penyuluh berperan sebagai koordinator dan pendamping kader dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau kegiatan edukasi di komunitas. Dengan mekanisme tersebut, terbentuk struktur pendampingan berjenjang yang membantu menjaga konsistensi pesan, memperkuat kapasitas kader, dan mendukung keberlanjutan edukasi hingga tingkat akar rumput.

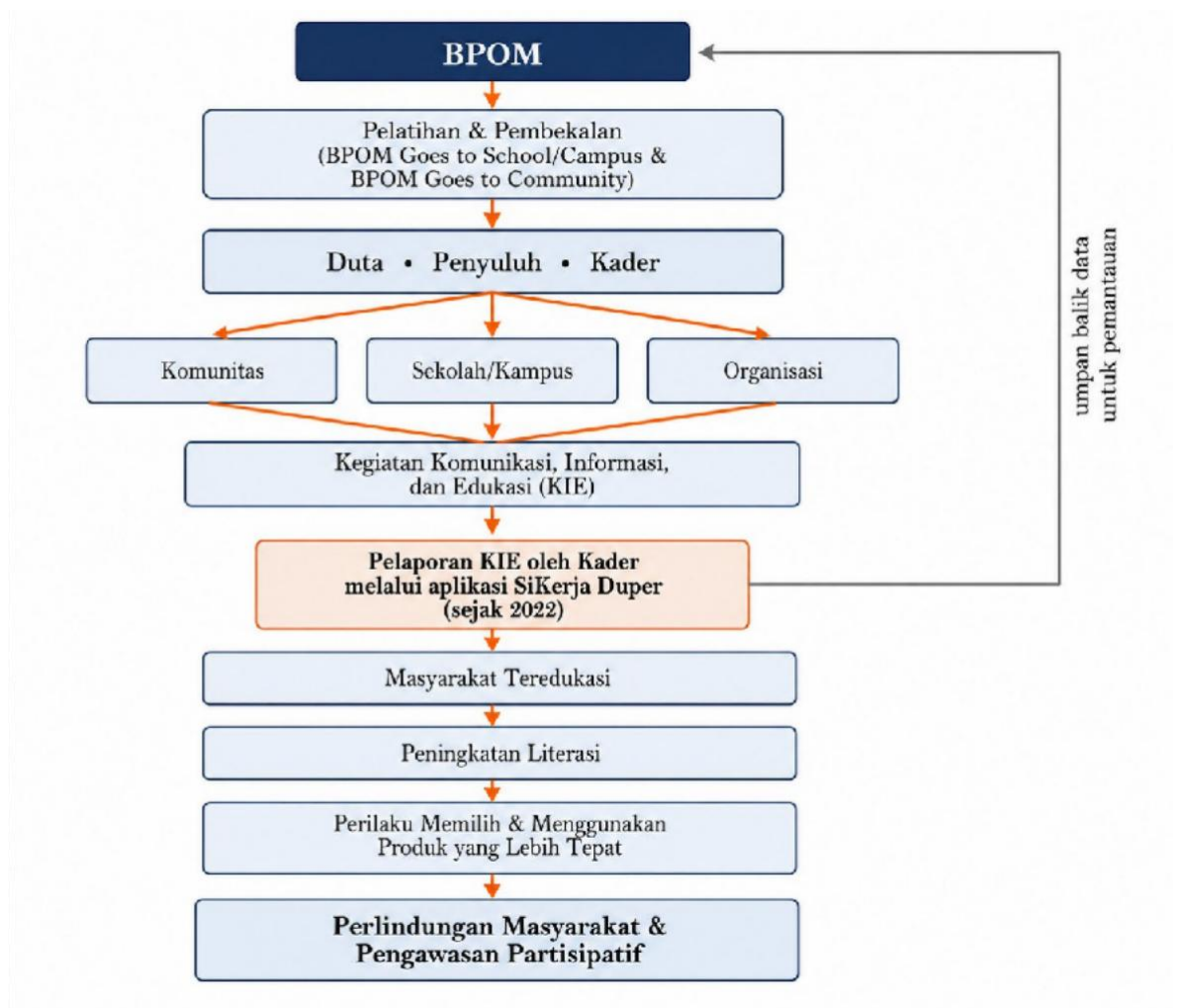
Penguatan kapasitas duta, penyuluh, dan kader dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan pelatihan bagi pelatih (*training of trainers/ToT*). Tujuannya agar para agen perubahan tidak hanya memahami materi OBASKK, tetapi juga terampil menyampaikan informasi secara efektif dan kontekstual. Pentingnya penguatan kapasitas ini didukung oleh temuan empiris bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan kesehatan secara terstruktur dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kader secara bermakna [18]. Dengan pembekalan tersebut, proses edukasi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada petugas Badan POM, melainkan diperluas melalui jejaring masyarakat yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan.

Implementasi program juga didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unit pelaksana teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini memungkinkan kegiatan KIE menjangkau kelompok sasaran yang lebih beragam dan memperluas penyebaran informasi di berbagai

wilayah.

2) Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Multiplier Effect

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Multiplier Effect sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Model ini menggambarkan bahwa proses pemberdayaan dimulai dari peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembekalan dalam kerangka program BPOM Goes to School/Campus dan BPOM Goes to Community, dilanjutkan dengan pembentukan/penguatan duta, penyuluh, dan kader sebagai jejaring edukasi. Para agen perubahan kemudian melaksanakan tugasnya dalam bentuk pelaksanaan kegiatan KIE di komunitas, sekolah/kampus, dan organisasi masing-masing sehingga menghasilkan efek pengganda dalam penyebaran informasi.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Multiplier Effect

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, model ini juga mengakomodasi tahap pelaporan kegiatan KIE oleh kader yang sejak 2022 dilakukan melalui aplikasi SiKerja Duper. Tahap pelaporan ini penting karena mendokumentasikan aktivitas KIE dan memberikan umpan balik data bagi pemantauan program. Secara teoretis, keseluruhan alur ini konsisten dengan konsep difusi inovasi yang menempatkan agen perubahan (*change agents*) sebagai penghubung antara sumber informasi resmi dan sistem sosial masyarakat [19]. Duta, penyuluh, dan kader berfungsi sebagai simpul edukasi yang menjangkau berbagai kelompok; karena setiap agen memiliki karakteristik dan jejaring sosial yang berbeda, pesan dapat disampaikan secara lebih

kontekstual dan oleh figur yang dipercaya komunitasnya, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi risiko di bidang OBASKK. Dari perspektif pemberdayaan, model ini menunjukkan transformasi peran masyarakat dari objek edukasi menjadi pelaku edukasi, sejalan dengan konsep yang menekankan peningkatan kapasitas individu agar mampu menjadi penggerak perubahan di komunitasnya [20].

3) Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021–2025

Program pemberdayaan yang dilaksanakan Direktorat PMPU OTSKK selama 2021–2025 menunjukkan perkembangan berkelanjutan, baik dari aspek model, jumlah agen, maupun jangkauan edukasi. Berdasarkan hasil analisis dokumen, selama periode tersebut terbentuk 1.201 duta, penyuluh, dan kader yang menjangkau 2.081.929 masyarakat melalui kegiatan KIE [13]–[17]. Rincian pembentukan agen setiap tahun disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembentukan Duta, Penyuluh, dan Kader Tahun 2021–2025

No	Tahun	Duta Jamu Aman	Duta Kosmetik Aman	Penyuluh	Kader	Jumlah
1	2021	25	33	–	–	58
2	2022	–	252	62	33	347
3	2023	–	–	20	253	273
4	2024	–	–	–	311	311
5	2025	–	–	–	212	212
Total		25	285	82	809	1.201

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021–2025 [13]–[17] (diolah)

Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap agen perubahan secara rata-rata mampu menjangkau sekitar 1.733 anggota masyarakat melalui kegiatan KIE. Angka ini memberikan gambaran mengenai potensi efek pengganda dari pendekatan pemberdayaan berbasis agen. Ketika satu orang telah dibekali pengetahuan, materi, dan keterampilan komunikasi, manfaat pembekalan tersebut tidak berhenti pada individu yang mengikuti pelatihan, tetapi dapat diteruskan kepada keluarga, kelompok sebaya, komunitas, organisasi, sekolah, kampus, maupun masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, investasi program pada satu agen perubahan berpotensi menghasilkan jangkauan edukasi yang jauh melampaui kapasitas kegiatan yang hanya mengandalkan petugas pemerintah. Kehadiran agen juga membantu membentuk simpul-simpul edukasi di tengah masyarakat, sehingga informasi dapat disampaikan melalui bahasa yang lebih kontekstual, saluran komunikasi yang dekat dengan kelompok sasaran, dan hubungan sosial yang telah terbentuk. Kedekatan tersebut menjadi nilai tambah karena masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi yang disampaikan oleh individu yang dikenal dan dipercaya.

Angka 1.733 masyarakat per agen perlu dipahami sebagai nilai rata-rata, bukan sebagai ukuran kinerja individual setiap duta, penyuluh, atau kader. Intensitas kegiatan, kemampuan komunikasi, dukungan organisasi, luas jejaring sosial, kondisi geografis, serta ketersediaan sarana edukasi dapat berbeda antar wilayah. Namun demikian, capaian ini tetap penting karena memperlihatkan bahwa model pemberdayaan masyarakat memiliki kemampuan untuk memperluas jangkauan edukasi secara lebih efisien. Bila penyampaian informasi hanya dilakukan oleh petugas BPOM, cakupan kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia, waktu, anggaran, dan luasnya wilayah pelangawasan. Kehadiran agen perubahan membantu mengatasi keterbatasan tersebut dengan membentuk simpul-simpul edukasi di tengah masyarakat.

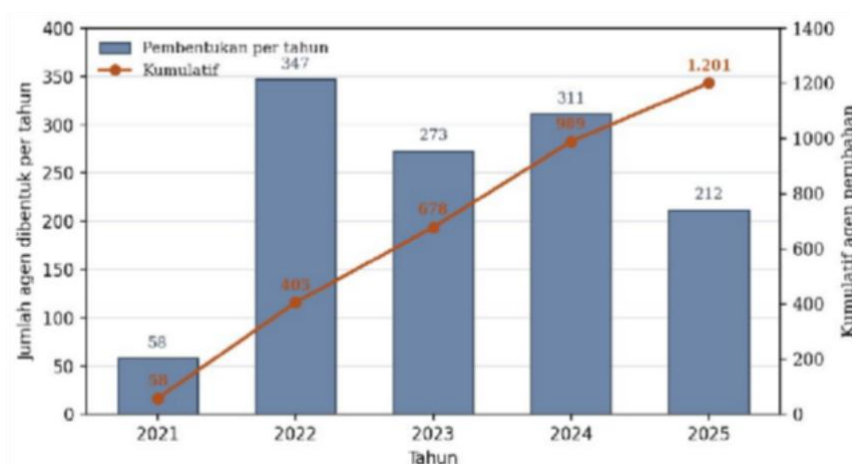
Perkembangan program dapat pula ditinjau dari akumulasi jumlah agen dan laju pertumbuhannya sebagaimana disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Kumulatif dan Laju Pertumbuhan Agen Perubahan Tahun 2021–2025

Tahun	Pembentukan Tahun Berjalan	Jumlah Kumulatif	Pertumbuhan Tahunan (%)	Fokus Dominan
2021	58	58	—	Duta
2022	347	405	+498,3	Duta & Penyuluh
2023	273	678	–21,3	Kader
2024	311	989	+13,9	Kader
2025	212	1.201	–31,8	Kader

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021–2025 [13]–[17] (diolah)

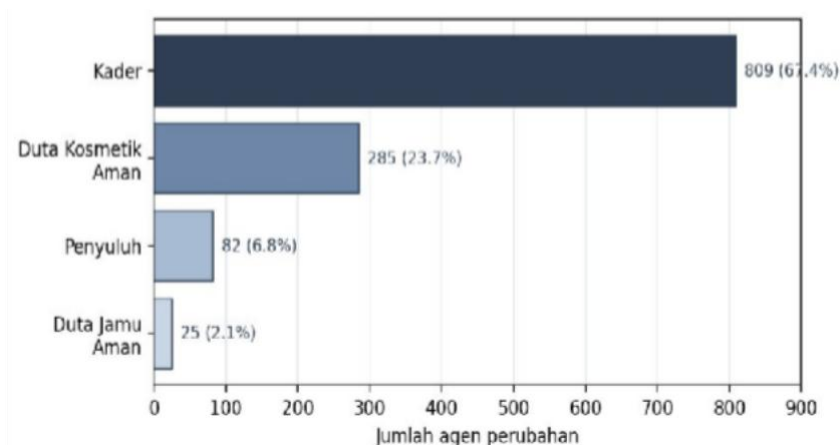
Tabel 2 memperlihatkan bahwa jumlah kumulatif agen tumbuh konsisten dari 58 orang pada 2021 menjadi 1.201 orang pada 2025. Laju pertumbuhan tahunan berfluktuasi: lonjakan tajam terjadi pada 2022 (+498,3%) seiring ekspansi awal program, sementara pada 2023 dan 2025 tercatat perlambatan (–21,3% dan –31,8%). Pola ini mengindikasikan bahwa perluasan program tidak berlangsung linier, melainkan dipengaruhi perubahan fokus strategi dan, ketersediaan sumber daya dan kemungkinan lainnya pada tahun berjalan. Dinamika tersebut divisualisasikan pada gambar 2.



Gambar 2. Pertumbuhan Agen Perubahan per Tahun dan Kumulatif Tahun 2021–2025

Pada gambar 2, batang menunjukkan jumlah agen yang dibentuk setiap tahun dan garis menunjukkan akumulasinya. Meskipun pembentukan tahunan berfluktuasi, kurva kumulatif tetap menaik secara monoton, yang menegaskan bahwa setiap tahun program konsisten menambah kapasitas jejaring edukasi berbasis masyarakat. Namun, melandainya kemiringan kurva pada 2024–2025 memberikan sinyal awal bahwa laju penambahan agen mulai melambat, sehingga menjaga kesinambungan pembentukan menjadi perhatian penting bagi keberlanjutan program.

Ditinjau dari komposisinya, jenis agen yang dibentuk selama periode tersebut tidak merata sebagaimana divisualisasikan pada gambar 3. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa kader merupakan jenis agen paling dominan (809 orang; 67,4%), diikuti Duta Kosmetik Aman (285 orang; 23,7%), Penyuluh (82 orang; 6,8%), dan Duta Jamu Aman (25 orang; 2,1%). Dominasi kader mencerminkan orientasi program yang semakin menekankan penanaman edukasi yang membumi dan berkelanjutan pada tingkat komunitas, dan menjadi dasar empiris bagi analisis pergeseran strategi berikutnya.



Gambar 3. Komposisi Agen Perubahan menurut Jenis Tahun 2021–2025

4) Pergeseran Strategi: Keseimbangan antara Jangkauan dan Kedalaman

Data pada tabel 1 dan gambar 3 memperlihatkan pergeseran fokus strategi pembentukan agen sepanjang 2021–2025. Pada tahap awal (2021–2022), program menekankan pembentukan duta melalui BPOM Goes to School/Campus sebagai figur muda penyampai pesan yang mampu menjangkau audiens luas secara cepat. Sejak 2023, fokus bergeser pada pembentukan penyuluh dan kader melalui BPOM Goes to Community yang menanamkan edukasi lebih membumi dan berkelanjutan. Karakteristik masing-masing jenis agen dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Tipologi dan Orientasi Strategi Pembentukan Agen Perubahan

Jenis Agen	Payung Program	Periode Dominan	Basis Rekrutmen & Peran Utama	Orientasi Strategi
	BPOM Goes to School/Campus	2021–2022	Pelajar & mahasiswa; penyampai pesan kreatif berjangkauan luas	Perluasan jangkauan edukasi
	BPOM Goes to Community	2022–2023	Tokoh masyarakat, Tenaga pendidik, tokoh organisasi, anggota komunitas; pelaksana KIE sekaligus koordinator/pendamping kader (untuk Penyuluh)	Jembatan & penggerak
	BPOM Goes to Community	2023–2025	Anggota komunitas; pelaksana KIE dan pelaporan melalui SiKerja Duper	Kedalaman & keberlanjutan program

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK 2021–2025 [13]–[17] (diolah)

Tabel 3 memperjelas bahwa ketiga jenis agen tidak bersifat substitutif, melainkan komplementer pada sumbu jangkauan–kedalaman. Duta unggul dalam memperluas jangkauan secara cepat, penyuluh berperan sebagai jembatan dan penggerak yang mengoordinasikan kegiatan di komunitas, sedangkan kader menjamin kedalaman dan keberlanjutan edukasi di tingkat akar rumput. Pergeseran fokus dari duta menuju kader dengan demikian dapat dimaknai bukan sebagai penggantian, tetapi sebagai pematangan strategi—dari menekankan perluasan jangkauan menuju penguatan kedalaman dukungan. Secara keseluruhan, pola ini memperkuat gagasan bahwa pembentukan agen tidak sekadar menambah jumlah sumber daya edukasi, tetapi membangun mekanisme penyebaran informasi berantai (*multiplier effect*) yang

memperluas jangkauan program tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi langsung dari pemerintah.

5) Faktor Pendukung Keberhasilan Program

Analisis dokumen mengidentifikasi bahwa keberhasilan program ditopang oleh proses penguatan kapasitas yang dirancang secara bertahap dan terstruktur. Bimbingan teknis, pelatihan, dan *training of trainers* tidak hanya membekali agen dengan pengetahuan mengenai obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, tetapi juga mengembangkan kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Aspek ini penting karena penguasaan materi saja belum cukup untuk menghasilkan edukasi yang efektif. Agen juga perlu mampu menyesuaikan bahasa, metode, dan contoh dengan karakteristik kelompok sasaran. Ketersediaan modul serta materi edukasi yang terstandar semakin memperkuat proses tersebut dengan menjaga konsistensi, akurasi, dan kesesuaian pesan di berbagai wilayah, tanpa menutup ruang bagi agen untuk menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih kontekstual.

Keberlanjutan program juga didukung oleh monitoring, pembinaan lanjutan, dan pemanfaatan sistem informasi. Kegiatan pemantauan memungkinkan pengelola program menilai perkembangan aktivitas agen setelah pelatihan, mengenali hambatan di lapangan, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks ini, aplikasi SiKerja Duper berperan sebagai instrumen pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan KIE. Keberadaan sistem tersebut membantu memastikan bahwa aktivitas agen tidak berhenti sebagai kegiatan yang bersifat insidental, tetapi terdokumentasi sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Data yang terkumpul juga dapat menjadi dasar untuk melihat pola keaktifan, jangkauan kegiatan, serta kebutuhan pembinaan, meskipun kualitas pemanfaatannya tetap bergantung pada ketepatan dan kedisiplinan pelaporan.

Faktor pendukung lainnya adalah kuatnya jejaring kelembagaan yang menghubungkan program dengan berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan UPT Badan POM di seluruh Indonesia memperluas jangkauan geografis sekaligus mendekatkan pelaksanaan kegiatan pada konteks lokal. Sementara itu, kemitraan dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, serta organisasi kemasyarakatan memperkuat legitimasi program, memperluas sumber daya, dan membuka akses terhadap kelompok sasaran yang lebih beragam. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak dapat dijalankan oleh satu institusi secara sendiri. Keberhasilannya tumbuh dari hubungan antaraktor yang saling melengkapi, berbagi peran, dan menjaga kesinambungan edukasi. Dengan demikian, program ini lebih tepat dipahami sebagai ekosistem edukasi berbasis masyarakat yang bertumpu pada kapasitas agen, dukungan sistem, serta kerja sama lintas sektor.

6) Tantangan Implementasi Program

Di samping berbagai faktor pendukung, implementasi program masih menghadapi tantangan pada tingkat keaktifan dan kapasitas agen. Tidak semua duta, penyuluh, dan kader tetap aktif setelah mengikuti pelatihan. Sebagian mampu menjalankan KIE secara konsisten, sedangkan sebagian lainnya belum terlibat secara optimal. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh motivasi, dukungan organisasi, ketersediaan waktu, serta akses terhadap materi edukasi. Kemampuan komunikasi antargen juga tidak selalu sama, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat berbeda dalam hal kejelasan, kedalaman, dan daya tarik.

Tantangan berikutnya terletak pada monitoring dan pelaporan. Pelaksanaan pemantauan belum merata di seluruh wilayah, sementara sebagian kegiatan belum dilaporkan secara real time. Kondisi ini membuat data capaian tidak selalu mutakhir dan sulit dibandingkan secara konsisten antarwilayah. Akibatnya, pengelola program dapat mengalami keterlambatan dalam mengenali agen yang kurang aktif, wilayah yang membutuhkan penguatan, maupun kegiatan yang perlu diperbaiki. Sistem pelaporan karena itu perlu dibuat lebih sederhana, mudah

digunakan, dan didukung pendampingan yang memadai agar agen tidak memandang pelaporan sebagai beban administratif.

Keberlanjutan peran agen setelah pelatihan juga menjadi perhatian penting. Pembekalan awal belum cukup untuk menjaga semangat dan konsistensi kegiatan dalam jangka panjang. Agen memerlukan pembinaan berkala, pembaruan materi, ruang berbagi pengalaman, umpan balik, dan bentuk pengakuan atas kontribusinya. Pergantian agen maupun pengelola program juga berpotensi mengurangi kesinambungan dan memori kelembagaan apabila pengetahuan serta pengalaman tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah agen yang dibentuk, tetapi juga oleh kemampuan program dalam menjaga mereka tetap aktif, kompeten, dan terhubung dengan sistem pendampingan yang berkelanjutan.

7) Implikasi dan Arah Pengembangan Program

Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa tantangan utama pengembangan program bukan semata memperbanyak jumlah agen, melainkan menjaga keseimbangan antara perluasan jangkauan (reach) dan pendalaman dukungan kepada agen (depth) tanpa mengubah karakter program sebagai pemberdayaan masyarakat. Arah pengembangan yang dapat ditempuh dirangkum pada Tabel 4, yang memetakan strategi pada kedua dimensi tersebut sekaligus prinsip yang menjaga agar pengembangan tidak bergeser menjadi pendekatan yang sentralistik atau semata administratif.

Tabel 4. Arah Pengembangan Program pada Sumbu Jangkauan–Kedalaman

Aspek Pengembangan	Strategi Perluasan Jangkauan	Strategi Pendalaman Dukungan Agen	Prinsip Penjaga Karakter Pemberdayaan
	Pembelajaran digital & microlearning untuk memperluas akses pelatihan	Pendampingan berjenjang & penyegaran materi pasca-pelatihan	Kapasitas dibangun dari dan untuk komunitas
	Perluasan rekrutmen lintas komunitas melalui UPT	Sertifikasi duta, penyuluh, kader & jenjang peran agen	Pengakuan memperkuat kepemilikan, bukan menggantikan kesukarelaan
	Dashboard nasional untuk memetakan sebaran kegiatan	Umpan balik kinerja individual melalui SiKerja Duper untuk pembinaan	Data untuk pembinaan, bukan sekadar kontrol administratif
	Kemitraan lintas sektor & antar-kementerian/lembaga	Komunitas praktik antaragen perubahan	Keberlanjutan bertumpu pada ikatan sosial komunitas
	Pemantauan cakupan berbasis teknologi analitik	Evaluasi kualitas interaksi edukatif, bukan hanya volume	Keberhasilan diukur pada keberdayaan masyarakat

Sumber: analisis penulis (2026)

Tabel 4 menegaskan bahwa perluasan jangkauan dan pendalaman dukungan bukan pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi yang harus dijaga secara simultan. Setiap strategi pengembangan baik yang bersifat memperluas maupun memperdalam diletakkan dalam koridor prinsip pemberdayaan, sehingga penggunaan teknologi, sertifikasi, maupun dashboard

tetap ditujukan untuk memperkuat keberdayaan dan kepemilikan masyarakat, bukan menggantikan peran sukarela agen atau mereduksi program menjadi sekadar pengelolaan data.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian bertumpu pada data sekunder dari dokumen resmi program sehingga capaian yang dilaporkan bersifat swalapor (self-reported) dan tidak diverifikasi secara independen. Kedua, penelitian mengukur keluaran program (jumlah agen dan jangkauan edukasi), bukan hasil (outcome) berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat; dengan demikian, klaim mengenai peningkatan literasi dan penguatan pengawasan partisipatif perlu dimaknai sebagai potensi kontribusi. Ketiga, angka rata-rata jangkauan per agen merupakan nilai agregat yang tidak menggambarkan variasi antardaerah maupun kualitas interaksi edukatif. Penelitian lanjutan yang mengukur outcome melalui survei literasi, evaluasi perubahan perilaku, atau analisis kontribusi pelaporan masyarakat sangat direkomendasikan.

4. KESIMPULAN

Program pembentukan duta, penyuluh, dan kader yang dilaksanakan Direktorat PMPU OTSKK selama 2021–2025 merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam edukasi dan perlindungan di bidang OBASKK. Selama periode tersebut terbentuk 1.201 agen perubahan yang menjangkau 2.081.929 masyarakat melalui kegiatan KIE, dengan rata-rata sekitar 1.733 masyarakat per agen. Pembentukan duta dikemas dalam program BPOM Goes to School/Campus, sedangkan penyuluh dan kader dikembangkan melalui BPOM Goes to Community, disertai pergeseran fokus dari duta menuju penguatan kader komunitas yang mencerminkan pematangan strategi dari perluasan jangkauan menuju pendalaman dukungan. Keberhasilan program ditopang oleh penguatan kapasitas terstruktur, modul terstandar, pemanfaatan aplikasi SiKerja Duper, dan kolaborasi lintas sektor; sementara tantangan utama terletak pada keaktifan dan keberlanjutan peran agen, pemerataan monitoring, serta pergantian sumber daya manusia.

Melalui mekanisme efek pengganda, pembentukan agen perubahan berpotensi memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat pengawasan partisipatif di bidang OBASKK. Pengembangan program ke depan perlu menjaga keseimbangan antara perluasan jangkauan dan pendalaman dukungan kepada agen tanpa mengubah karakter pemberdayaan, antara lain melalui perluasan berbasis UPT, optimalisasi pelaporan digital, pemeliharaan peran agen, dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Mengingat penelitian ini terbatas pada cakupan keluaran, penelitian lanjutan yang mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat diperlukan untuk memperkuat bukti efektivitas strategi pemberdayaan ini.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi strategis yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perluasan jangkauan dan pendalaman dukungan tanpa mengubah karakter program sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pertama, memperluas cakupan program ke daerah melalui optimalisasi peran UPT Badan POM. Sebagai institusi yang berada dekat dengan masyarakat, UPT memiliki posisi strategis untuk menjangkau komunitas hingga tingkat lokal, sehingga perluasan berbasis UPT dapat mengatasi keterbatasan jangkauan geografis sekaligus menjaga kesesuaian materi edukasi dengan karakteristik daerah. Perluasan ini juga berpotensi pemeratakan pembentukan agen yang selama ini masih berfluktuasi antarwaktu sebagaimana tampak pada tabel 2.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan SiKerja Duper agar pelaporan kegiatan KIE berlangsung lebih real time dan menghasilkan data yang lebih kaya. Pelaporan yang tepat waktu dan terstruktur tidak hanya memperbaiki akurasi dokumentasi capaian, tetapi

juga memungkinkan pemantauan berbasis data untuk pengambilan keputusan, identifikasi wilayah yang belum terjangkau, dan evaluasi kualitas kegiatan. Penguatan fitur analitik serta indikator keluaran dan hasil pada aplikasi akan membantu menjembatani keterbatasan penelitian ini yang masih terbatas pada data keluaran.

Ketiga, menjaga keberlanjutan peran duta, penyuluh, dan kader yang telah terbentuk melalui program pemeliharaan (maintaining) pasca-penugasan. Investasi penguatan kapasitas akan memberikan hasil optimal apabila agen tetap aktif setelah kegiatan KIE utamanya selesai. Mekanisme seperti pembinaan berkala, komunitas praktik antar-agen, penyegaran materi, dan pemberian pengakuan dapat menjaga motivasi sekaligus memperpanjang masa kontribusi, sehingga menjawab tantangan keberlanjutan yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

Keempat, memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki program serupa agar sumber daya yang tersedia dapat saling dioptimalkan. Banyak instansi menyelenggarakan program pemberdayaan dan edukasi masyarakat dengan sasaran yang beririsan; sinergi lintas kementerian/lembaga dapat menghindari duplikasi kegiatan, memperluas jangkauan bersama, serta memperkuat keberlanjutan melalui berbagi platform, jejaring, dan pendanaan. Kolaborasi semacam ini sejalan dengan prinsip tata kelola kesehatan yang menekankan kemitraan lintas sektor.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, atas ketersediaan data dan dukungan dalam penyusunan tulisan ini.

7. PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan ChatGPT dan Claude sebagai alat bantu penyuntingan bahasa, penyempurnaan penulisan, dan membantu mengeksplorasi alternatif penyajian pembahasan, namun tidak menggantikan proses berpikir, analisis, maupun pertimbangan ilmiah penulis. Seluruh substansi, interpretasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dalam naskah ini merupakan hasil kajian penulis dan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

8. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta, 2023.
- [2] World Health Organization, *Ottawa Charter for Health Promotion*. Geneva: WHO, 1986.
- [3] World Health Organization, *Shanghai Declaration on Promoting Health in the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Geneva: WHO, 2016.
- [4] World Health Organization, *Achieving Well-being: A Global Framework for Integrating Well-being into Public Health Utilizing a Health Promotion Approach*. Geneva: WHO, 2023.
- [5] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII, 2025.
- [6] C. M. P. Putri, D. Aristi, R. N. Alkaff, U. K. Desita, H. Meilani, S. Sabrina, dan R. D. J. Maulidia, "Literasi Kesehatan Mental dan Perilaku Diagnosis Diri pada Mahasiswa," *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, vol. 6, no. 2, art. 7, 2025, doi: 10.47034/ppk.v6i2.1090.
- [7] I. N. Sjamsuddin dan D. Anshari, "Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen Literasi Kesehatan Digital untuk Mahasiswa Program Sarjana," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, vol. 6, no. 1, pp. 68–74, 2023, doi: 10.56338/mppki.v6i1.2902.

- [8] D. Nutbeam, "Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century," *Health Promotion International*, vol. 15, no. 3, pp. 259–267, 2000, doi: 10.1093/heapro/15.3.259.
- [9] World Health Organization, *WHO Community Engagement Framework for Quality, People-Centred and Resilient Health Services*. Geneva: WHO, 2017.
- [10] *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029*. Jakarta: Badan POM, 2025.
- [11] S. Suprpto dan D. Arda, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas*, vol. 1, no. 2, pp. 77–87, 2021, doi: 10.25311/jpkk.Vol1.Iss2.957.
- [12] R. Ayu Rahmadani, A. A. Sainal, dan S. Suprpto, "Community Empowerment to Increase Knowledge About Tuberculosis," *Abdimas Polsaka: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 117–123, 2023.
- [13] Direktorat PMPU OTSKK, *Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2021*. Jakarta: Badan POM, 2022. [Daring]. Tersedia: <https://pmpuotskk.pom.go.id/informasi-publik>
- [14] Direktorat PMPU OTSKK, *Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2022*. Jakarta: Badan POM, 2023. [Daring]. Tersedia: <https://pmpuotskk.pom.go.id/informasi-publik>
- [15] Direktorat PMPU OTSKK, *Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2023*. Jakarta: Badan POM, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://pmpuotskk.pom.go.id/informasi-publik>
- [16] Direktorat PMPU OTSKK, *Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2024*. Jakarta: Badan POM, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://pmpuotskk.pom.go.id/informasi-publik>
- [17] Direktorat PMPU OTSKK, *Laporan Tahunan Direktorat PMPU OTSKK Tahun 2025*. Jakarta: Badan POM, 2026. [Daring]. Tersedia: <https://pmpuotskk.pom.go.id/informasi-publik>
- [18] R. Kusuma, M. Ginting, dan Y. A. Prasetyo, "Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Kader Kesehatan tentang Bantuan Hidup Dasar di Desa Sukajadi Kec. Soreang," *Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel*, vol. 17, no. 2, pp. 73–80, 2023, doi: 10.36051/jiki.v17i2.222.
- [19] E. M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. New York: Free Press, 2003.
- [20] M. A. Zimmerman, "Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis," in *Handbook of Community Psychology*, J. Rappaport and E. Seidman, Eds. New York: Kluwer Academic/Plenum, 2000, pp. 43–63.